

POLITIK ISLAM PADA MASA ORDE BARU ERA 70

Bayu Widiyanto

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
A. PENDAHULUAN.....	3
1. Latar Belakang.....	3
2. Rumusan Masalah	3
3. Tujuan dan Manfaat Penulisan	3
4. Kajian Pustaka	4
B. PEMBAHASAN	5
1. Tinjauan Umum Tentang Politik.....	5
a. Pengertian Politik Secara Umum.....	5
b. Pengertian Politik Islam.....	7
2. Pentingnya Mempelajari Politik Islam	7
3. Politik Islam Era Orde Baru Tahun 70-an.....	10
C. PENUTUP	13
1. Kesimpulan.....	13
2. Saran	14
3. Kata Penutup	14
DAFTAR PUSTAKA.....	15

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan politik Islam di Indonesia telah berlangsung sejak sebelum jaman kolonial hingga saat ini. Selama perkembangan tersebut berlangsung tentunya tidak lepas dari grafik yang menjadi tolok ukur kemajuan politik Islam, di antaranya adalah politik Islam pada masa orde baru tahun 70-an. Telah banyak diketahui bahwa Islam mulai berkembang pesat pada era orde baru. Pada masa itu banyak dibangun madrasah-madrasah dan sekolah Islam, dan pada masa itu pula agama Islam di Indonesia tidak pernah mengalami penistaan; alim ulama dan para kyai dilindungi dan dihormati. Oleh sebab itu pentingnya judul ini menjadi bahan diskusi atau kajian agar masyarakat Indonesia bisa mengerti sejarah yang sesungguhnya, dengan harapan mereka bisa menjaga dan merawat perjuangan para pendahulunya.

Perlu kita ketahui bersama bahwa perkembangan politik Islam pada masa ini tidak mengalami perubahan, bahkan mengalami penurunan. Terlalu banyak aliran dan golongan menjadikan antara umat Islam yang satu dengan yang lain saling berbenturan. Tidak jarang pula para kyai dan alim ulama yang difitnah, diadu domba, bahkan dipenjara. Padahal seandainya mau menelaah lebih dalam sejarah yang sebenarnya, mereka justru para pejuang sesungguhnya yang berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu para generasi muda mari perkaya diri dengan mengenal sejarah nenek moyang Indonesia, mengenal warisan politik Islam yang telah ditinggalkan; agar sebagai generasi penerus bangsa dapat senantiasa melestarikan dan melanjutkan kebangkitan politik Islam yang telah mereka perjuangkan.

2. Rumusan Masalah

- a. Apa yang dimaksud dengan politik Islam?
- b. Mengapa politik Islam perlu dipelajari?
- c. Bagaimana politik Islam pada era orde baru tahun 70-an?

3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk mengetahui apa itu politik Islam.

- 2) Untuk mengetahui pentingnya mempelajari politik Islam.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana politik Islam pada masa orde baru.

b. Manfaat Penulisan

- 1) Memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai politik Islam era orde baru tahun 70-an.
- 2) Sebagai sumbangan keilmuan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya prodi Manajemen Pendidikan Islam.

4. Kajian Pustaka

Penulis menggunakan berbagai rujukan dalam penulisan ini; seperti skripsi, jurnal maupun artikel. Adapun rujukan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Skripsi oleh Dedek Sulaiman yang berjudul *Deideologi Politik Islam: Kebijakan Pemerintah Orde Baru dalam Pemberlakuan Asas Tunggal*. Skripsi ini menjelaskan tentang banyaknya dampak yang ditimbulkan karena pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru. Salah satu hal relevan untuk ditinjau adalah dampak perubahan pemikiran ekonomi dan sosial politik masyarakat sebagai akibat lahirnya Orde Baru. Demikian pula dampaknya terhadap respon pemikiran masyarakat Islam Indonesia. Sebab, bagaimanapun perubahan-perubahan pada pemikiran umum itu sangat mempengaruhi perkembangan pola pemikiran Islam.¹

Artikel Jurnal oleh Qisthi Faradina Ilma Mahanani, Mega Alif Marintan, Irma Ayu Kartika Dewi, dan Moh. Ashif Fuadi, dengan judul *Islam dan Politik di Indonesia: Perspektif Sejarah*. Jurnal ini menjelaskan tentang perspektif Islam dan politik di Indonesia yang dinamis. Hubungan antara keislaman dengan situasi politik yang ada di Indonesia tak selalu harmoni. Dengan metode kualitatif melalui studi pustaka penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa indikasi Islam dan politik merupakan dua aspek yang menyatu dalam perkembangannya yang tidak pernah terputus dari periode sebelumnya.²

Artikel Jurnal oleh Muh. Syamsuddin, Muh. Fatkhan dengan judul *Dinamika Islam Pada Masa Orde Baru*. Jurnal ini menjelaskan tentang plat form politik Soeharto

¹ Fahry Ali, *Islam, Pancasila dan Pergulatan Politik*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1984), hlm. 93.

² Qisthi Faradina Ilma Mahanani, Mega Alif Marintan, Irma Ayu Kartika Dewi, Moh. Ashif Fuadi, "Islam dan Politik di Indonesia (Perspektif Sejarah)", *Journal of Islamic Civilization*, Vol.3.1 No. 01 June 2022, hlm. 61.

dalam mengatur sirkulasi gerakan Islam. Hal ini ditandai dengan dibentuknya ICMI sebagai upaya menetralsir bahaya latent kekuasaan Islam.³

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Tentang Politik

a. Pengertian Politik Secara Umum

Kata politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata asal tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*. Kata politik terambil dari bahasa Latin *politicus* dan bahasa Yunani *politicos* yang berarti *relating to a citizen* (hubungan masyarakat). Kedua kata tersebut juga berasal dari kata *polis* yang bermakna *city* (kota).⁴ Fenomena istilah *polis* berkembang di abad Yunani kuno, utamanya ketika Socrates menterjemahkan *polis* sebagai kota yang setaraf dengan Negara.

Politik kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan tiga arti, yaitu:

- 1) Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu Negara atau terhadap Negara lain.
- 2) Tipu muslihat atau kelecikan,
- 3) Dan dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.⁵

Secara istilah, *politik* pertama kali dikenal melalui buku karya Plato yang berjudul *Poletia* yang dikenal dengan *Republik*. Menurut Deliar Noor bahwa arti sebenarnya dari *polietia* adalah konstitusi, yakni suatu jalan atau cara bagi setiap orang untuk berhubungan dengan sesamanya dalam pergaulan hidup masyarakat.⁶

Sementara dalam ensiklopedia dijelaskan bahwa, politik adalah sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan dan lembaga-lembaga. Proses-proses politik

³ Muh. Syamsuddin & Muh. Fatkhan, "Dinamika Islam Pada Masa Orde Baru", *Jurnal Dakwah*, Vol. XI, No. 2, Juli-Desember 2010.

⁴ Abd. Muin Salim, *Fiqih Siasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 34.

⁵ W.J.S. Poerdaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), 2739.

⁶ Salim, *Fiqih Siasah*, hlm. 34.

merupakan kegiatan perseorangan maupun kelompok yang menyangkut hubungan kemanusiaan secara mendasar.⁷

Sedangkan secara terminologi, banyak definisi yang dikemukakan oleh para tokoh. Menurut Miriam Budiarto politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tertentu. Joyce Mitchell berpendapat bahwa politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.⁸

Namun hal ini berbeda dengan ilmu politik, yang didefinisikan dari beberapa pakar, yaitu:⁹

- 1) Menurut Roger H. Soltau (1950), ilmu politik adalah tentang Negara, maksud dan tujuan Negara, lembaga yang melaksanakan tujuan tersebut, hubungan antara Negara dengan warganegaranya, serta hubungan antara Negara, dan juga apa yang dipikirkan negaranya.
- 2) Menurut Robert A. Dahl (1978), ilmu politik adalah tentang siasat, atau lebih pula disebutkan sebagai pelajaran terperinci dari berbagai cara, yaitu usaha pembahasan yang teratur untuk menemukan pencegahan kebingungan yang kacau dalam pengertian yang lebih luas dan lebih umum hubungannya.
- 3) Menurut Johan K. Bluntschli (1933), ilmu politik adalah ilmu yang memperhatikan masalah kenegaraan, yaitu yang berusaha keras untuk mengerti dalam paham kondisi situasi Negara, yang bersifat penting dalam berbagai bentuk manifestasi pembangunan.
- 4) Menurut Raymond G. Gettel (1933), ilmu politik adalah ilmu yang membahas Negara, hal tersebut berlaku baik antara seseorang dengan orang lain yang paling ujung sekalipun disentuh hukum, hubungan antar perorangan, ataupun kelompok orang-orang dengan negaranya, serta hubungan Negara dengan Negara.

Perbedaan ilmu politik dan politik itu sendiri adalah bahwa ilmu politik yaitu pengetahuan tentang kemasyarakatan, mempelajari masalah kekuasaan dan

⁷ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1984), hlm. 2739.

⁸ Jeje Abdul Rozak, *Politik Kenegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 40.

⁹ Inu Kencana Syafii, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2010), hlm. 10.

masyarakat. Sedangkan politik adalah secara literal; politik dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *siyasah*. Oleh karena itu, di dalam buku-buku ulama salaf atau ulama klasik dikenal istilah *siyasah syar'iyah*. Di dalam kitab Al-Muhith dijelaskan bahwa *siyasah* berakar kata *sasa-yasusu*. Dalam kalimat *sasa addawaba yasusuha siyasatani* berarti *Qama 'alaiha wa radlaha wa addawabbaha* yang mempunyai arti mengurusinya, melatihnya, mengasuhnya, dan mendidiknya. Bila dikatakan *Sasa al-Amra* itu sama artinya dengan *dabbarahu* (mengurusi atau mengatur perkara).¹⁰

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengertian umum politik adalah upaya, prinsip, cara, atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dalam pengertian kebijakan, politik merupakan sebuah kebijakan yang diberlakukan baik kepada organisasi, masyarakat, maupun Negara dalam rangka sebagai alat atau sarana mencapai tujuan.

b. Pengertian Politik Islam

Dalam agama Islam, bukan masalah Ubudiyah dan Ilahiyah saja yang dibahas, akan tetapi tentang kemaslahatan umat juga dibahas dan diatur dalam Islam, salah satu yang dibahas dalam kajian ini adalah Politik Islam yang dalam bahasa agamanya disebut fiqih siyasah. Fiqih siyasah dalam konteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (Politik Islam). Secara bahasa *Fiqh* adalah mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat amali melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan siyasah adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan.¹¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik Islam adalah pengaturan, kebijakan atau pengambilan keputusan dengan didasarkan pada hukum-hukum Islam.

2. Pentingnya Mempelajari Politik Islam

Politik Islam penting untuk dipelajari agar dapat mengetahui pemikiran politik dari sudut pandang Islam. Serta dengan mempelajari politik Islam kita dapat mengetahui dinamika perkembangan politik Islam, khususnya pada masa Orde Baru, terutama berkenaan dengan relasi antara agama (Islam) dan politik (Negara). Menurut sudut pandang Islam, ada beberapa tujuan dan landasan politik Islam, yaitu:

¹⁰ Abd. Halim, *Relasi Islam Politik & Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2013), hlm. 23.

¹¹ Widi Supriyanto, *Sistem Politik Islam*, (Yogyakarta: STTNAS, 2014), hlm. 9.

Menurut Munawir Sadzalli, di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antara ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di muka bumi, berikut prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan seperti prinsip-prinsip musyawarah atau konstitusi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan dan kebebasan beragama.¹²

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ
بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.¹³

Dalam ayat ini besi dijadikan sebagai lambang kekuasaan politik. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa misi para Rasul adalah menciptakan kondisi masyarakat yang berkeadilan dan memberi rasa aman. Hal ini sesuai dengan norma-norma yang diterangkan dalam al-Qur'an, dimana al-Qur'an juga memberikan peringatan akan perintah dan larangan yang outputnya adalah keadilan, keamanan, dan kedisiplinan. Ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ
غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢٥﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu,

¹² Wilaela, *Sejarah Islam Klasik*, (Pekanbaru : Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016), hlm. 112.

¹³ Lihat Q.S Al-Hadiid : 25.

atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا إِيَّاهُ
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹⁵

Prinsip keadilan dalam Islam selalu dikaitkan dengan kekuasaan, karena kekuasaan nantinya menentukan kebijakan yang akan menghasilkan output keadilan. Kekuasaan yang moderat atau mengambil jalan tengah lebih baik karena hal itu akan membuat keadilan merata tanpa memandang perbedaan. Sehingga termasuk kategori mendekati ketakwaan adalah salah satunya pemimpin yang adil.

Agaknya telah menjadi jelas bahwa tujuan Negara menurut al-Qur'an adalah menegakkan keadilan dan kebenaran dengan menjamin keamanan bagi masyarakat dari segala bentuk kejahatan, penindasan, dan ketidakadilan. Oleh karena itu politik Islam yang diterapkan di suatu Negara adalah dalam rangka menjamin kebebasan kepada para pemeluk agama Islam untuk beribadah dan berdakwah selama hal itu tidak menentang undang-undang yang diterapkan di Negara tersebut. Selain itu Negara juga menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang berlangsungnya keberagamaan. Sebagai contohnya adalah Negara Indonesia yang menyediakan sarana dan prasarana seperti kementerian agama, dan lembaga-lembaga agama lainnya.

¹⁴ Lihat Q.S. An-Nisa: 135.

¹⁵ Lihat. Q.S. Al-Maidah: 8.

3. Politik Islam Era Orde Baru Tahun 70-an

Orde baru diamanahkan untuk menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Upaya yang dilakukan untuk melakukan tugas tersebut adalah melakukan rehabilitasi dan stabilisasi politik dan keamanan (polkam) agar pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat dapat segera dimulai. Pemerintahan Orde Baru melakukan pendekatan yang populer dengan sebutan pendekatan keamanan (*security approach*). Pendekatan keamanan termasuk di dalamnya de-Soekarnoisasi dan depolitisasi kekuatan-kekuatan organisasi sosial politik yang dinilai akan merongrong kewibawaannya.¹⁶

Selain depolitisasi di kalangan umat Islam, Kuntowidjojo menilai pemerintah Orde Baru tidak begitu ramah terhadap gerakan Islam; gerakan Islam kembali terpojokkan. Tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan gerakan Islam mengalami “*crisis syndrome*” atau “*war-time mentality*”. Umat Islam selalu terancam krisis dan berjalan dari kekecewaan-kekecewaan.¹⁷

Depolitisasi umat Islam sudah terjadi sejak masa Demokrasi Terpimpin, ketika Masyumi menolak tegas ideologi Nasakom yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno. Sikap Masyumi ini menempatkan Masyumi berkonfrontasi secara langsung dengan Presiden Soekarno. Berbeda dengan Masyumi, umat Islam yang menerima ideologi Nasakom tetap diakomodasi dalam kekuasaan seperti NU, PSII, Perti. Meskipun demikian, partai Islam pada masa ini kehilangan identitasnya karena politik akomodasionis terhadap pihak penguasa.

Orde Baru dimulai dengan penuh harapan oleh kalangan yang tidak lagi mempercayai kepemimpinan Soekarno.¹⁸ Kalangan Islam, seperti Masyumi berharap dapat berperan kembali di bidang pemerintahan seperti zaman Demokrasi Liberal. Akan tetapi, perkiraan kalangan Islam itu ternyata jauh dari harapan. Soeharto tidak hanya menyingkirkan kepentingan-kepentingan PKI dari pemerintahan, tetapi juga menyingkirkan kepentingan umat Islam di pemerintahan yang dianggap pernah melanggar UUD 1945 dan melakukan penyimpangan terhadap pancasila.¹⁹

¹⁶ Anhar Gonggong dan Musa Asy'arie. *ed. Op., cid.* Hlm. 14.

¹⁷ M. Rusli Karim, *Dinamika Islam Indonesia*, (Yogyakarta, 1985), hlm. 191-192.

¹⁸ Deliar Noer, *loc. Cit.*, hlm. 14.

¹⁹ Muhammad Hisyam, *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, (Jakarta, 2003), hlm. 355.

Depolitisasi umat Islam masa Orde Baru makin meluas dibanding masa Demokrasi Terpimpin. Penilaian ini berdasarkan pada kebijakan politik Orde Baru yang lebih anti politik Islam dibandingkan masa Demokrasi Terpimpin. Orde Baru menerapkan kebijakan terhadap Islam yang hampir sama seperti yang pernah diterapkan diterapkan oleh Belanda terhadap Islam. Kebijakan Belanda terhadap Islam dicetuskan oleh Christian Snouck Hurgronje.²⁰ Kebijakan tersebut berpendapat dukung sepenuhnya Islam agama dan pukul sampai ke akar-akarnya Islam politik.²¹ Atas dasar ini Orde Baru menjauhkan peranan politik dari kalangan Islam.

Orde Baru masih toleran terhadap partai-partai Islam yang dinilai moderat dan dapat bekerjasama dengan pemerintah seperti NU, PSII, dan Perti. Akan tetapi, Orde Baru bersikap keras terhadap kekuatan Islam radikal atau yang biasa disebut “ekstrem kanan”.²² Kalangan Islam yang dikategorikan sebagai ekstrem kanan dianggap oleh pemerintah akan mengganggu stabilitas dan keamanan. Anggapan Orde Baru ini terbentuk dari pengalaman masa sebelumnya yang mencatat keterlibatan tokoh-tokoh Masyumi dalam DI (Darul Islam) dan APRRI.

Intinya pada masa Orde Baru banyak sekali lobi-lobi politik yang dilakukan oleh Soeharto, salah satunya adalah politik yang dilakukan terhadap Islam. Pada masa pemerintahan sepuluh tahun pertama, presiden Soeharto bisa dikatakan bersikap membatasi dan menindas terhadap aspirasi umat Islam. Kebijakan Soeharto dalam menciptakan kestabilan NKRI pada zaman Orde Baru harus mengorbankan demokrasi dan hak-hak masyarakatnya, termasuk organisasi politik dan organisasi Islam. Organisasi politik dan organisasi Islam harus mengalami keterbatasan dalam melakukan pengembangan. Setelah pemilihan umum tahun 1971, Pemerintahan Orde Baru

²⁰ Snouck berpendapat Islam sama sekali tidak bisa dianggap remeh baik secara kekuatan politik maupun agama di Indonesia. Snouck memiliki pendapat yang berbeda dengan sarjana-sarjana yang lain dalam memandang Islam di Indonesia. *Pertama*, Snouck berpendapat orang-orang Islam sebagai orang yang baik dan setia sehingga dia menolak pendapat umat Islam secara besar-besaran akan pindah agama ke Kristen. *Kedua*, Snouck memprediksikan persebaran Islam akan semakin meluas seiring perkembangan *Pax Nederlandica*. Kedua faktor di atas memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan yang akan diberlakukan pada kalangan Islam. Snouck berpendapat musuhnya bukanlah Islam sebagai agama tetapi Islam sebagai doktrin politik. Islam sebagai doktrin politik akan menimbulkan fanatisme terhadap persatuan umat Islam (pan-Islamisme). Para ulama pun dapat menghasut pengikutnya untuk berjihad melawan orang Belanda yang kafir. Lihat dalam Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, (Jakarta, 1980), hlm. 41-44.

²¹ Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, (Jakarta, 2003), hlm. 553.

²² Orde Baru mengkategorikan ekstrem kanan sebagai kekuatan Islam radikal dan fundamentalis.

selanjutnya menawarkan penyederhanaan Partai Politik sehingga hanya terdapat 3 partai Politik yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peleburan dan penfusi terhadap beberapa partai politik pada tahun 1973 yakni:

- 1) Kelompok Nasionalis (PNI, IPKI, Murba).
- 2) Kelompok Spiritual (NU, PMI (Parmusi), PSSI, Perti, Parkindo dan Katholik).
Belakangan karena Parkindo dan Katholik berbeda agama, maka berafiliasi dengan nasionalis.
- 3) Golongan Karya

Kelompok spiritual menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan kelompok nasionalis disebut Partai Demokrasi Indonesia (PDI).²³

Semua kebijakan yang membatasi dan menyudutkan Islam membuat umat Islam bersifat opositif terhadap pemerintah. Bahkan pada dasawarsa ini fatwa-fatwa ulama mewajibkan umat Islam memilih partai Islam dalam pemilu. Dakwah-dakwah yang disampaikan dari tokoh agama Islam juga sering berisi kritik-kritik terhadap pemerintah. Menanggapi hal tersebut pemerintah melakukan pembatasan aktivitas dakwah Islam, termasuk keharusan adanya surat izin dari aparat keamanan setempat bagi da'i sebelum penyampaian dakwah, sehingga muncul ketegangan yang menimbulkan hubungan antara umat Islam dan pemerintah kurang lancar. Akibatnya pemerintah kesulitan melakukan komunikasi dengan umat Islam, karena tidak ada organisasi Islam yang supportif terhadap pemerintah.²⁴

Oleh karena itu pada tahun 1975 pemerintah membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki fungsi yaitu:

- 1) Mengeluarkan fatwa atau hukum serta nasehat baik terhadap pemerintah maupun masyarakat dalam rangka amar makruf nahi munkar dalam agama dan masalah-masalah sosial.
- 2) Meningkatkan ukuwwah (persaudaraan) Islam serta memelihara sikap toleran dengan kelompok-kelompok agama lain.
- 3) Mewakili umat Islam dalam komunikasi dengan pemeluk agama lain.

²³ Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 78.

²⁴ Azra, Azyumardi: Umam, Syaiful (ed), *Menteri-Menteri Agama dan RI: Biografi dan Politik*, (Jakarta: PPMI, 1998), hlm. 328.

4) Bertindak sebagai media komunikasi antara ulama dengan pemerintah, dan menyampaikan kebijakan pemerintah agar dapat dipahami masyarakat umum.²⁵

Jika dilihat dari fungsinya MUI bisa dikatakan pula sebagai penyalur antara umat dengan pemerintah. Dengan adanya MUI sendiri sebagian berpendapat bahwa MUI lebih dikontrol oleh pemerintah sehingga pada saat itu masih lebih mementingkan kepentingan pemerintah. Selai itu MUI pada saat itu dinyatakan sebagai wadah musyawarah yang diakui oleh pemerintah sehingga yang lainnya tidak dianggap sah.

Setelah adanya penyederhanaan partai serta berdirinya MUI, Soeharto juga menerapkan asas tunggal pancasila. Kebijakan pemberlakuan asas tunggal atau *political uniform* dilakukan oleh Orde Baru didesain melalui pendekatan legalistik yang berawal dari ketetapan MPR RI Nomor 11/1983 yang secara operasional dituangkan dalam perundang-undangan Nomor 3 dan Nomor 8 Tahun 1985.²⁶ Maka, dengan adanya keputusan ini baik organisasi masa maupun partai politik, semua harus mencantumkan pancasila sebagai asas mereka. Sehingga banyak organisasi masyarakat maupun partai politik yang merubah asas mereka yang sebagian berasas Islam kemudian menjadi berasas pancasila. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan organisasi mereka. Oleh karena itu bersamaan dengan ditetapkannya UU Asas Tunggal banyak dari mereka yang meninggalkan politik, dan hampir semua kelompok Islam mau mengubah asas perjuangan organisasinya dari Islam menjadi Pancasila.²⁷

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pada bab pembahasan terdapat tiga point penting, yaitu:

a. Tinjauan umum tentang politik.

1) Pengertian politik secara umum

Pengertian umum politik adalah upaya, prinsip, cara, atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dalam pengertian kebijakan, politik merupakan sebuah kebijakan yang diberlakukan baik kepada organisasi,

²⁵ *Ibid.*, hlm. 328.

²⁶ Syarifudin Jurdi (Eds), *I Abad Muhammadiyah*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 278.

²⁷ Muhammad Hisyam (peny), *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 344.

masyarakat, maupun Negara dalam rangka sebagai alat atau sarana mencapai tujuan.

2) Pengertian politik Islam.

Politik Islam adalah pengaturan, kebijakan atau pengambilan keputusan dengan didasarkan pada hukum-hukum Islam.

b. Pentingnya mempelajari politik Islam

Politik Islam penting untuk dipelajari agar dapat mengetahui pemikiran politik dari sudut pandang Islam. Serta dengan mempelajari politik Islam kita dapat mengetahui dinamika perkembangan politik Islam, khususnya pada masa Orde Baru, terutama berkenaan dengan relasi antara agama (Islam) dan politik (Negara).

c. Politik Islam era Orde Baru tahun 70-an

Intinya pada masa Orde Baru banyak sekali lobi-lobi politik yang dilakukan oleh Soeharto, salah satunya adalah politik yang dilakukan terhadap Islam. Pada masa pemerintahan sepuluh tahun pertama, presiden Soeharto bisa dikatakan bersikap membatasi dan menindas terhadap aspirasi umat Islam. Kebijakan Soeharto dalam menciptakan kestabilan NKRI pada zaman Orde Baru harus mengorbankan demokrasi dan hak-hak masyarakatnya, termasuk organisasi politik dan organisasi Islam. Organisasi politik dan organisasi Islam harus mengalami keterbatasan dalam melakukan pengembangan.

2. Saran

Sejarah bangsa Indonesia mungkin saja telah banyak mengalami penyelewengan, termasuk sejarah politik Islam Indonesia. Oleh karena itu harapannya para generasi muda tidak bosan untuk terus mempelajari sejarah politik Islam di Indonesia agar memiliki kesadaran penuh tentang sejarah yang sebenarnya, dan bisa mengambil pelajaran darinya.

3. Kata Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat Allah Swt. karya ilmiah ini bisa diselesaikan dengan baik. Saya ucapka terimakasih kepada semua pihak yang turut memberikan dukungan dalam pengerjaan karya ilmiah ini. Semoga sedikit tulisan ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian. Aamiin

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, F. (1984). *Islam, Pancasila dan Pergulatan Politik*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Azra, A., & Umam, S. (1998). *Menteri-Menteri Agama dan RI: Biografi dan Politik*. Jakarta: PMII.
- Dhakidae, D. (2003). *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta.
- Gonggong, A., & Asy'arie, M. (n.d.). *ed. Op.,cid*.
- Halim, A. (2013). *Relasi Islam Politik & Kekuasaan*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Hisyam, M. (2003). *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Jakarta.
- Hisyam, M. (2003). *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ilma Mahanani, Q. F., Marintan, M. A., Kartika, I. A., & Fuadi, M. A. (2022). Islam dan Politik di Indonesia (Perspektif Sejarah). *Journal of Islamic Civilization*, 61.
- Jurdi, S. (2010). *I Abad Muhammadiyah*. Jakarta: Kompos.
- Karim, M. R. (1985). *Dinamika Islam Indonesia*. Yogyakarta.
- Poerdaminta, W. (1983). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rozak, J. A. (2001). *Politik Kenegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Salim, A. M. (1995). *Fiqih Siasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shadily, H. (1984). *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Sunanto, M. (2021). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriyanto, W. (2014). *Sistem Politik Islam*. Yogyakarta: STTNAS.
- Syafiie, I. K. (2010). *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syamsuddin, M., & Fatkhan, M. (2010). Dinamika Islam Pada Masa Orde Baru. *Jurnal Dakwah*.

Wilaela. (2016). *Sejarah Islam Klasik*. Pekanbaru: Fakultas Ushuludin UIN Sultan Syarif Kasim Riau.